PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ringkasan Eksekutif

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Puji *angayubagia* kami panjatkan ke hadapan Ida Sanghyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas *asung kertha wara nugraha*-Nya penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2052 dapat terselesaikan.

Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mengamanatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Buleleng. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2052 berisikan pendahuluan, kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampungg wilayah, permasalahan dan target lingkungan hidup, dan arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada komponen masyarakat Buleleng, Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan Hidup di Kabupaten Buleleng, Dunia Usaha da semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2052. Semoga Dokumen RPPLH ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.

Singaraja, Agustus 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,

Gede Melandrat, S.P.
NIP. 19720712 199803 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah, baik wilayah negara maupun wilayah administratif. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Berdasarkan definisi maka dapat diketahui komponen yang ada di dalam lingkungan hidup antara lain adalah ruang, manusia dan aktivitas.

Upaya pembangunan di berbagai sektor yang semakin meningkat menyebabkan akan semakin meningkat pula dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong makin diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam (SDA), pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memandatkan perlu diperkuatnya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya dengan menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki fungsi penting untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan, baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus dibersi tugas mengelola lingkungan, maupun Lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Keserasian kebijakan ini penting agar tindakan pemerintahan yang dilakukan tidak saling tumpang tindih, tidak saling mengklaim sebagai lembaga yang berwenang, dan tidak saling lempar tanggung jawab jika terjadi permasalahan lingkungan hidup. Oleh karena itu, menurut pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim.

Dalam pasal 10 ayat (4) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai empat muatan, yaitu rencana tentang (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, penentuan materi muatan RPPLH wajib dilakukan melalui (1) analisis dokumen perencanaan yang terkait, dan (2) analisis dan telaah ekosistem dan jasanya yang berbasis ekoregion. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kebutuhan

penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di suatu wilayah sangat mendesak dan strategis. Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berencana menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Buleleng yang didahului dengan Kajian Teknis dalam penyusunan muatan–muatan RPPLH untuk menghasilkan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH Kabupaten Buleleng.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan tersebut untuk memberikan arahan dan masukan dan juga sebagai bahan dasar kajian dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buleleng maupun bentuk-bentuk kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Buleleng adalah:

1. Merencanakan upaya pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam (SDA).
2. Merencanakan upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
3. Merencanakan upaya pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam.
4. Merencanakan upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

BAB II
KONDISI UMUM DAN DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP WILAYAH

2.1 Pembagian Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (WPPLH)

Secara umum wilayah Kabupaten Buleleng terdiri dari 33 WPPLH, yang paling dominan adalah Gerokgak-Pegunungan Vulkanik dengan luasan 27.699,33 Ha.

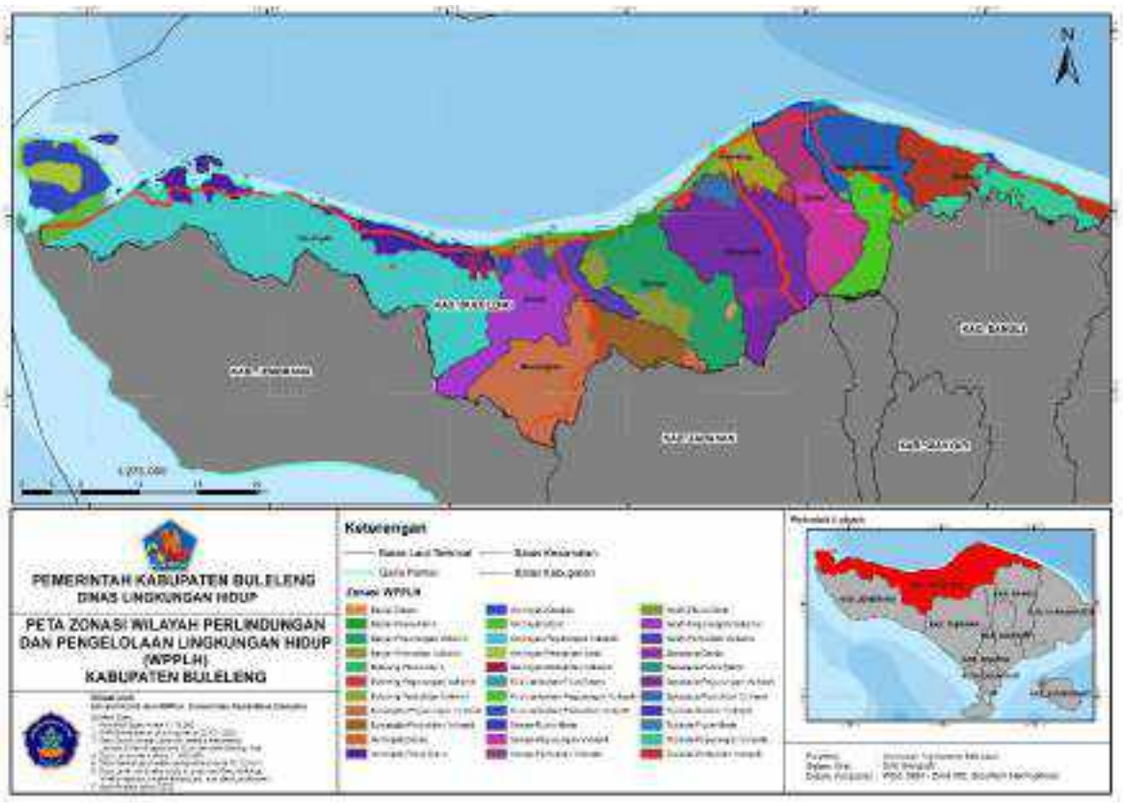

Gambar 2. 1 Peta Zonasi WPPLH di Kabupaten Buleleng

Tabel 2. 1 Luas WPPLH di Kabupaten Buleleng

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Total Luas (Ha)
1.	Banjar-Danau	152,52
2.	Banjar-Fluvio-Marin	1.014,08
3.	Banjar-Pegunungan Vulkanik	9.648,63
4.	Banjar-Perbukitan Vulkanik	3.072,52
5.	Buleleng-Fluvio-Marin	1.119,15
6.	Buleleng-Pegunungan Vulkanik	826,69
7.	Buleleng-Perbukitan Vulkanik	2.680,89
8.	Busungbiu-Pegunungan Vulkanik	10.071,82
9.	Busungbiu-Perbukitan Vulkanik	3.999,83
10.	Gerokgak-Danau	30,19
11.	Gerokgak-Fluvio-Marin	5.658,11
12.	Gerokgak-Koralian	3.837,50
13.	Gerokgak-Marin	1.445,59
14.	Gerokgak-Pegunungan Vulkanik	27.699,33
15.	Gerokgak-Perbukitan Karst	1.883,81
16.	Gerokgak-Perbukitan Vulkanik	404,09
17.	Kubutambahan-Fluvio-Marin	159,61

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	Total Luas (Ha)
18.	Kubutambahan-Pegunungan Vulkanik	4.977,44
19.	Kubutambahan-Perbukitan Vulkanik	6.719,94
20.	Sawan-Fluvio-Marin	397,42
21.	Sawan-Pegunungan Vulkanik	5.563,02
22.	Sawan-Perbukitan Vulkanik	3.168,88
23.	Seririt-Fluvio-Marin	1.470,47
24.	Seririt-Pegunungan Vulkanik	7.304,47
25.	Seririt-Perbukitan Vulkanik	3.478,23
26.	Sukasada-Danau	474,09
27.	Sukasada-Fluvio-Marin	50,59
28.	Sukasada-Pegunungan Vulkanik	14.425,20
29.	Sukasada-Perbukitan Vulkanik	1.128,27
30.	Tejakula-Dataran Vulkanik	327,58
31.	Tejakula-Fluvio-Marin	0,14
32.	Tejakula-Pegunungan Vulkanik	4.261,08
33.	Tejakula-Perbukitan Vulkanik	5.268,18
Total		132.719,37

2.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.2.1 Status Daya Dukung Lahan

Secara umum, daya dukung lahan di Kabupaten Buleleng berada pada kategori Belum Terlampaui dengan persentase luasan sebesar > 80 % dari total luas wilayah seluruh Kabupaten Buleleng. Berdasarkan Tabel 2.2, wilayah perencanaan masih didominasi Belum Terlampaui. Artinya, pada wilayah perencanaan tersebut masih minim pengembangan kegiatan atau aktivitas masyarakat dan masih besarnya peluang pemanfaatan sumber daya alamnya. Secara rinci, hasil daya dukung lahan dapat dicermati pada Gambar 2.2.

Tabel 2. 2 Luasan Kelas Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Buleleng

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	% Luasan Kelas Status Daya Dukung Lahan		Total Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	
1	Banjar-Danau	100.00%	0.00%	152.52
2	Banjar-Fluvio-Marin	46.43%	53.57%	1014.08
3	Banjar-Pegunungan Vulkanik	98.93%	1.07%	9648.63
4	Banjar-Perbukitan Vulkanik	91.45%	8.55%	3072.52
5	Buleleng-Fluvio-Marin	29.16%	70.84%	1119.15
6	Buleleng-Pegunungan Vulkanik	80.03%	19.97%	826.69
7	Buleleng-Perbukitan Vulkanik	61.30%	38.70%	2680.89
8	Busungbiu-Pegunungan Vulkanik	98.95%	1.05%	10071.82
9	Busungbiu-Perbukitan Vulkanik	94.59%	5.41%	3999.83
10	Gerokgak-Danau	100.00%	0.00%	30.19
11	Gerokgak-Fluvio-Marin	23.12%	76.88%	5658.11
12	Gerokgak-Koralian	99.22%	0.78%	3837.50
13	Gerokgak-Marin	34.12%	65.88%	1445.59
14	Gerokgak-Pegunungan Vulkanik	93.36%	6.64%	27699.33
15	Gerokgak-Perbukitan Karst	100.00%	0.00%	1883.81
16	Gerokgak-Perbukitan Vulkanik	34.94%	65.06%	404.09
17	Kubutambahan-Fluvio-Marin	34.03%	65.97%	159.61

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	% Luasan Kelas Status Daya Dukung Lahan		Total Luas (Ha)
		Belum Terlampaui	Sudah Terlampaui	
18	Kubutambahan-Pegunungan Vulkanik	98.61%	1.39%	4977.44
19	Kubutambahan-Perbukitan Vulkanik	91.18%	8.82%	6719.94
20	Sawan-Fluvio-Marin	17.50%	82.50%	397.42
21	Sawan-Pegunungan Vulkanik	97.49%	2.51%	5563.02
22	Sawan-Perbukitan Vulkanik	79.99%	20.01%	3168.88
23	Seririt-Fluvio-Marin	30.72%	69.28%	1470.47
24	Seririt-Pegunungan Vulkanik	98.55%	1.45%	7304.47
25	Seririt-Perbukitan Vulkanik	80.19%	19.81%	3478.23
26	Sukasada-Danau	97.01%	2.99%	474.09
27	Sukasada-Fluvio-Marin	99.53%	0.47%	50.59
28	Sukasada-Pegunungan Vulkanik	96.03%	3.97%	14425.20
29	Sukasada-Perbukitan Vulkanik	81.03%	18.97%	1128.27
30	Tejakula-Dataran Vulkanik	85.77%	14.23%	327.58
31	Tejakula-Fluvio-Marin	98.43%	1.57%	0.14
32	Tejakula-Pegunungan Vulkanik	92.27%	7.73%	4261.08
33	Tejakula-Perbukitan Vulkanik	92.31%	7.69%	5268.18
Total		88.00%	12.00%	132719.37

Jika dilihat secara rinci berdasarkan Tabel 2.2, secara umum Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terpilih yang mempengaruhi isu prioitas di wilayah perencanaan didominasi oleh status daya dukung Belum Terlampaui dengan persentase luas 88% dari total luas seluruh KRP yang dikaji. Dari seluruh KRP ini, wilayah dengan status Belum Terlampaui didominasi pada wilayah perlindungan Pegunungan Vulkanik dan Fluvio-Marin yang masing-masing memiliki presentase luas yang belum terpenuhi lebih dari 98,5%.

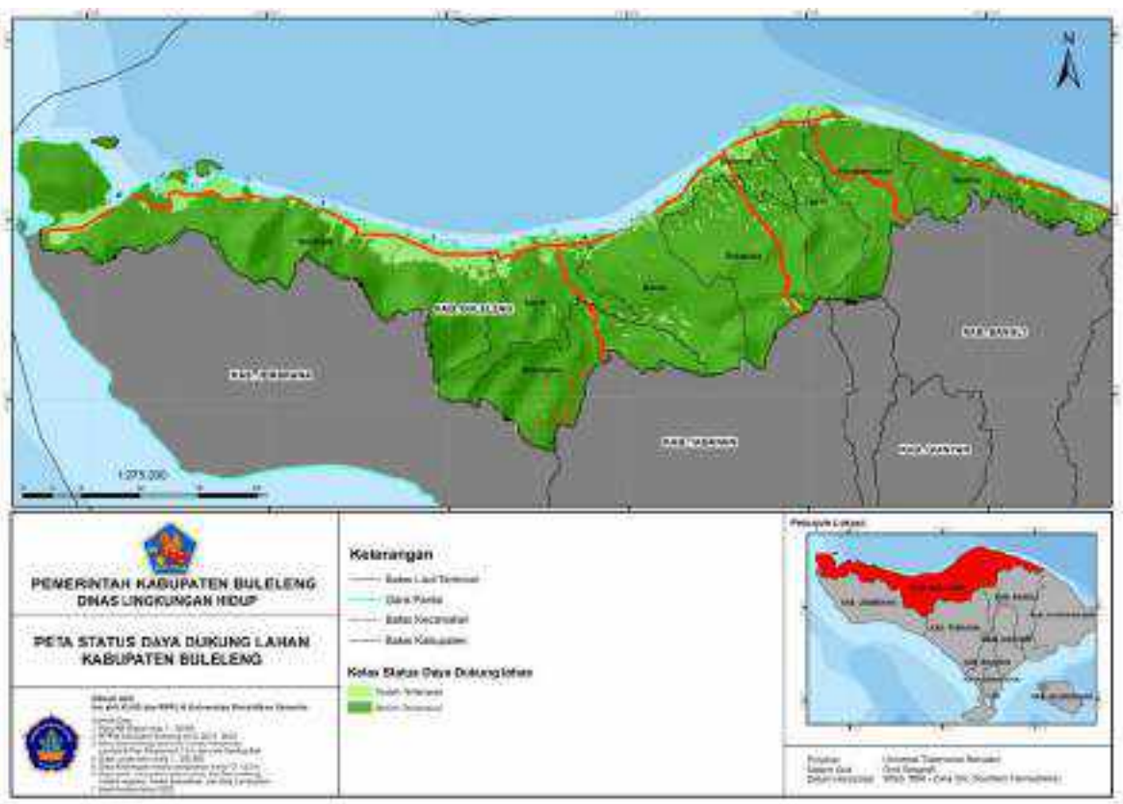

Gambar 2. 2 Peta Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Buleleng

2.2.2 Status Daya Dukung Air

Berdasarkan Tabel 2.3, secara umum Kabupaten Buleleng memiliki status daya dukung air yang Sudah Terlampaui dan Berkelanjutan dengan total persentase kelas sebesar 78,86% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Buleleng.

Tabel 2. 3 Status Air di Kabupaten Buleleng

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	% Luasan Status Air				Total Luas (Ha)
		Belum Terlampaui dan Berkelanjutan	Belum Terlampui namun Tidak Berkelanjutan	Sudah Terlampaui dan Berkelanjutan	Sudah Terlampui namun Tidak Berkelanjutan	
1	Banjar-Danau	0.00%	99.98%	0.02%	0.00%	152.52
2	Banjar-Fluvio-Marin	24.75%	36.55%	34.47%	4.24%	1014.08
3	Banjar-Pegunungan Vulkanik	0.07%	0.92%	97.83%	1.18%	9648.63
4	Banjar-Perbukitan Vulkanik	0.76%	0.50%	97.93%	0.81%	3072.52
5	Buleleng-Fluvio-Marin	50.02%	40.98%	8.86%	0.13%	1119.15
6	Buleleng-Pegunungan Vulkanik	15.87%	1.95%	59.90%	22.28%	826.69
7	Buleleng-Perbukitan Vulkanik	11.60%	16.38%	41.61%	30.41%	2680.89
8	Busungbiu-Pegunungan Vulkanik	0.09%	0.18%	98.66%	1.07%	10071.82
9	Busungbiu-Perbukitan Vulkanik	0.35%	0.32%	95.28%	4.05%	3999.83
10	Gerokgak-Danau	0.00%	6.69%	93.24%	0.07%	30.19
11	Gerokgak-Fluvio-Marin	51.78%	25.71%	19.84%	2.68%	5658.11
12	Gerokgak-Koralian	3.70%	48.87%	45.61%	1.82%	3837.50
13	Gerokgak-Marin	38.67%	49.00%	6.66%	5.67%	1445.59
14	Gerokgak-Pegunungan Vulkanik	4.65%	3.29%	87.59%	4.47%	27699.33
15	Gerokgak-Perbukitan Karst	2.15%	28.61%	69.23%	0.00%	1883.81
16	Gerokgak-Perbukitan Vulkanik	52.84%	13.98%	33.01%	0.17%	404.09
17	Kubutambahan-Fluvio-Marin	32.63%	65.93%	1.45%	0.00%	159.61
18	Kubutambahan-Pegunungan Vulkanik	0.00%	0.00%	96.54%	3.46%	4977.44
19	Kubutambahan-Perbukitan Vulkanik	8.81%	4.80%	68.22%	18.17%	6719.94
20	Sawan-Fluvio-Marin	3.67%	88.21%	6.52%	1.61%	397.42
21	Sawan-Pegunungan Vulkanik	0.00%	0.00%	89.75%	10.25%	5563.02
22	Sawan-Perbukitan Vulkanik	4.42%	10.91%	31.72%	52.95%	3168.88
23	Seririt-Fluvio-Marin	30.32%	50.07%	15.70%	3.91%	1470.47
24	Seririt-Pegunungan Vulkanik	0.10%	0.34%	97.72%	1.84%	7304.47
25	Seririt-Perbukitan Vulkanik	5.17%	8.80%	72.73%	13.30%	3478.23
26	Sukasada-Danau	2.67%	97.31%	0.02%	0.00%	474.09
27	Sukasada-Fluvio-Marin	6.23%	0.00%	93.77%	0.00%	50.59
28	Sukasada-Pegunungan Vulkanik	0.32%	0.73%	90.39%	8.56%	14425.20
29	Sukasada-Perbukitan Vulkanik	2.28%	4.67%	56.26%	36.79%	1128.27
30	Tejakula-Dataran Vulkanik	79.49%	0.00%	20.51%	0.00%	327.58
31	Tejakula-Fluvio-Marin	74.72%	0.00%	25.28%	0.00%	0.14
32	Tejakula-Pegunungan Vulkanik	5.44%	0.00%	91.83%	2.73%	4261.08
33	Tejakula-Perbukitan Vulkanik	10.25%	0.30%	89.18%	0.28%	5268.18
Total		6.80%	7.49%	78.86%	6.84%	132719.37

Secara khusus, wilayah Kabupaten Buleleng yang memiliki kondisi daya dukung air Sudah Terlampaui dan Berkelanjutan tertinggi berada pada KRP wilayah Pegunungan Vulkanik dan sebagian kecil Perbukitan Vulkanik dengan persentase mencapai 90% dari total luas wilayah. Wilayah Danau, Fluvio-Marin, Marin, dan Dataran Vulkanik merupakan persentase terendahnya. Kondisi ini menggambarkan masih terlampauinya penyediaan sistem air bersih atau air baku kedepannya di Kabupaten Buleleng dan tantangan dalam pengembangan peruman terkait penyediaan sistem air bersih atau air baku pada wilayah Danau, Fluvio-Marin, Marin, dan Dataran Vulkanik.

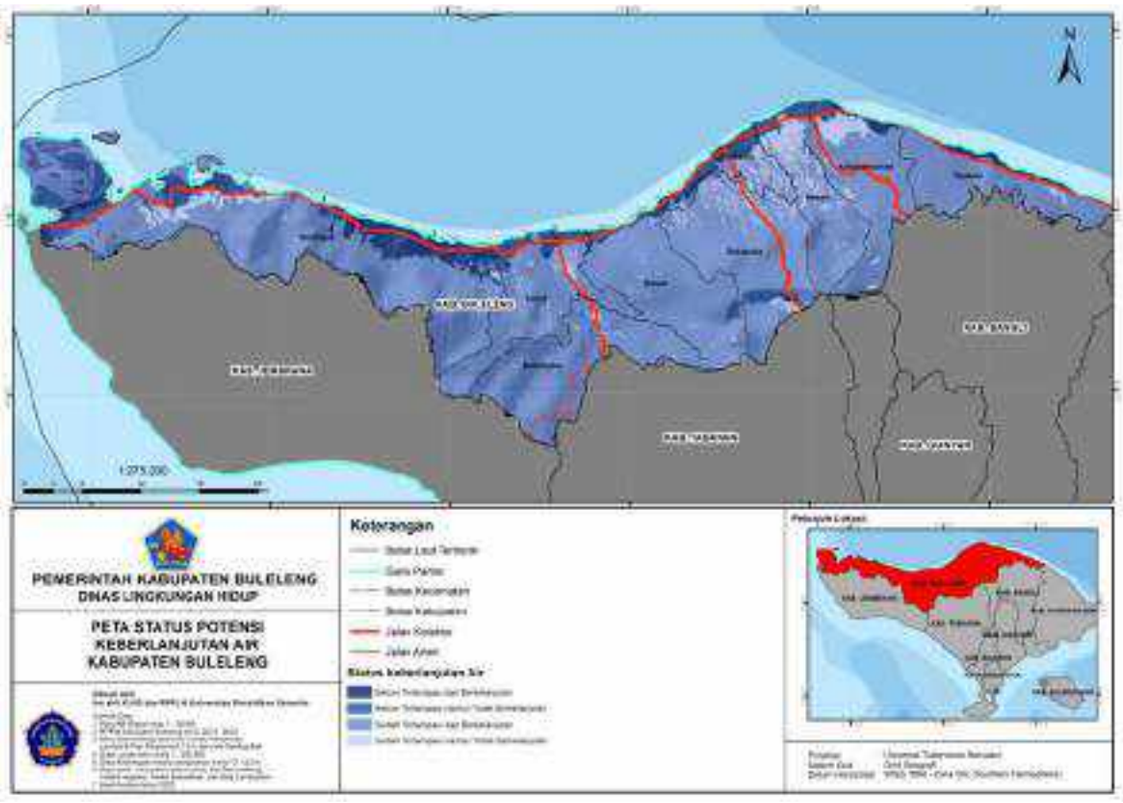

Gambar 2. 3 Peta Status Potensi Keberlanjutan Air Kabupaten Buleleng

2.2.3 Status Daya Dukung Pangan

Berdasarkan hasil pengolahan data, secara umum status daya dukung pangan Kabupaten Buleleng didominasi golongan kelas Dapat Mendukung Kemandirian Pangan Jangka Menengah yang letaknya berada di tengah kabupaten. Peta status pangan Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Gambar 2.4. Kondisi tersebut berarti Kabupaten Buleleng Dapat Mendukung untuk Kemandirian Pangan tetapi tidak dapat secara berkelanjutan.

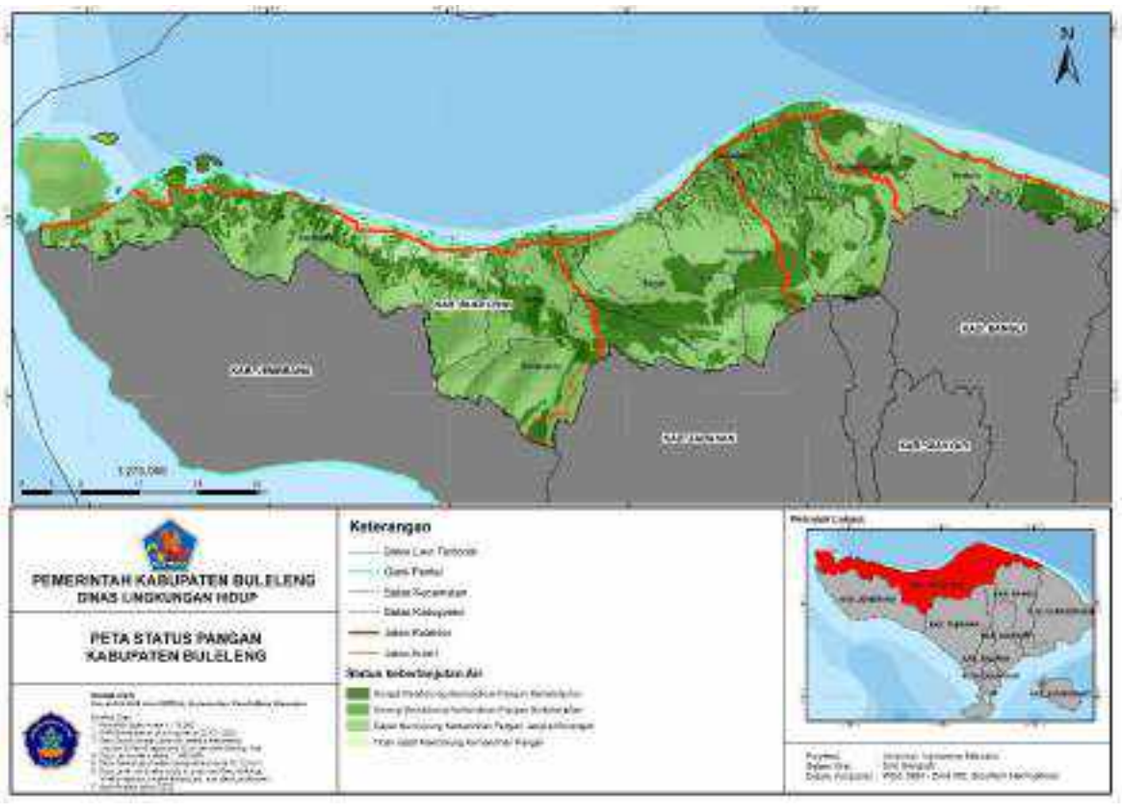

Gambar 2. 4 Peta Status Pangan Kabupaten Buleleng

Secara detail status daya dukung pangan terendah yang terdapat pada kelas Dapat Mendukung Kemandirian Pangan Jangka Menengah terdapat pada Kecamatan Banjar sebesar 0,02% dan Kecamatan Kubutambahan sebesar 1,82. Sedangkan pada kelas Kurang Mendukung Kemandirian Pangan Berkelanjutan yaitu terdapat di Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Tejakula sebesar 0,00%. Pada kelas Sangat Mendukung Kemandirian Pangan Berkelanjutan terdapat di Kecamatan Gerokgak sebesar 0,00%. Data terkait status daya dukung pangan Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2022

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	% Luasan Status Pangan				Total Luas (Ha)
		Dapat Mendukung Kemandirian Pangan Jangka Menengah	Kurang Mendukung Kemandirian Pangan Berkelanjutan	Sangat Mendukung Kemandirian Pangan Berkelanjutan	Tidak Dapat Mendukung Kemandirian Pangan	
1	Banjar-Danau	0,02%	99,97%	0,01%	0,00%	152,52
2	Banjar-Fluvio-Marin	36,04%	23,63%	14,81%	25,53%	1.014,08
3	Banjar-Pegunungan Vulkanik	72,13%	4,12%	23,52%	0,23%	9.648,63
4	Banjar-Perbukitan Vulkanik	53,86%	8,42%	36,97%	0,76%	3.072,52
5	Buleleng-Fluvio-Marin	17,79%	26,38%	4,76%	51,06%	1.119,15
6	Buleleng-Pegunungan Vulkanik	51,13%	0,71%	32,29%	15,87%	826,69
7	Buleleng-Perbukitan Vulkanik	30,21%	12,00%	46,07%	11,72%	2.680,89
8	Busungbiu-Pegunungan Vulkanik	84,28%	0,23%	15,39%	0,09%	10.071,82

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	% Luasan Status Pangan				Total Luas (Ha)
		Dapat Mendukung Kemandirian Pangan Jangka Menengah	Kurang Mendukung Kemandirian Pangan Berkelanjutan	Sangat Mendukung Kemandirian Pangan Berkelanjutan	Tidak Dapat Mendukung Kemandirian Pangan	
9	Busungbiu-Perbukitan Vulkanik	34,10%	8,56%	56,98%	0,35%	3.999,83
10	Gerokgak-Danau	10,81%	0,00%	82,50%	6,69%	30,19
11	Gerokgak-Fluvio-Marin	6,70%	44,60%	10,22%	38,48%	5.658,11
12	Gerokgak-Koralian	95,31%	0,01%	0,00%	4,69%	3.837,50
13	Gerokgak-Marin	33,47%	51,51%	0,20%	14,83%	1.445,59
14	Gerokgak-Pegunungan Vulkanik	85,07%	3,66%	8,10%	3,17%	27.699,33
15	Gerokgak-Perbukitan Karst	88,70%	0,00%	0,00%	11,30%	1.883,81
16	Gerokgak-Perbukitan Vulkanik	34,08%	19,19%	0,88%	45,85%	404,09
17	Kubutambahan-Fluvio-Marin	1,82%	63,42%	1,37%	33,39%	159,61
18	Kubutambahan-Pegunungan Vulkanik	74,67%	1,64%	23,69%	0,00%	4.977,44
19	Kubutambahan-Perbukitan Vulkanik	51,37%	4,66%	35,16%	8,81%	6.719,94
20	Sawan-Fluvio-Marin	12,94%	80,15%	3,24%	3,67%	397,42
21	Sawan-Pegunungan Vulkanik	74,28%	0,30%	25,43%	0,00%	5.563,02
22	Sawan-Perbukitan Vulkanik	26,46%	9,06%	60,05%	4,43%	3.168,88
23	Seririt-Fluvio-Marin	25,18%	50,38%	7,45%	16,98%	1.470,47
24	Seririt-Pegunungan Vulkanik	73,05%	0,75%	26,10%	0,10%	7.304,47
25	Seririt-Perbukitan Vulkanik	55,53%	12,94%	30,15%	1,38%	3.478,23
26	Sukasada-Danau	0,57%	96,75%	0,01%	2,67%	474,09
27	Sukasada-Fluvio-Marin	93,67%	0,00%	0,10%	6,23%	50,59
28	Sukasada-Pegunungan Vulkanik	66,14%	1,83%	31,70%	0,32%	14.425,20
29	Sukasada-Perbukitan Vulkanik	43,95%	1,78%	51,99%	2,28%	1.128,27
30	Tejakula-Dataran Vulkanik	14,59%	0,00%	5,92%	79,49%	327,58
31	Tejakula-Fluvio-Marin	19,42%	0,00%	5,86%	74,72%	0,14
32	Tejakula-Pegunungan Vulkanik	70,20%	9,35%	15,02%	5,44%	4.261,08
33	Tejakula-Perbukitan Vulkanik	82,85%	0,30%	6,61%	10,25%	5.268,18
Total		65,92%	7,47%	21,02%	5,59%	132.719,37

2.2.4 Potensi Sumber Daya Alam

2.2.4.1 Potensi Sumber Daya Perkebunan

Potensi sumber daya perkebunan Kabupaten Buleleng berdasarkan hasil analisis dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yang meliputi kelas Sangat Rendah, Rendah dan Tinggi. Dilihat dari Gambar 2.5 dapat diketahui bahwasanya potensi sumber daya perkebunan yang terdapat di Kabupaten Buleleng didominasi oleh kelas Tinggi di bagian barat dan timur. Hal tersebut dikarenakan ekoregion pada wilayah tersebut terbentuk dari daerah vulkanik sehingga memungkinkan untuk dapat menanam jenis tumbuhan untuk komoditas perkebunan. Dilihat dari penutup lahan juga dapat diketahui bahwasanya daerah barat Kabupaten Buleleng merupakan daerah hutan. Sedangkan di daerah timur tutupan lahannya berupa daerah sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera.

Gambar 2. 5 Peta Potensi Sumber Daya Perkebunan Kabupaten Buleleng

Secara detail daerah yang memiliki potensi sumber daya perkebunan tertinggi di Kabupaten terdapat di tiga wilayah yaitu Kecamatan Sukasada dengan besaran 96,78% seluas 50,59 Ha, Kecamatan Kubutambahan 87,32% seluas 159,61 Ha dan Kecamatan Sawan 81,13% seluas 397,42 Ha. Data potensi sumber daya perkebunan Kabupaten Buleleng tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Potensi Sumber Daya Perkebunan Tahun 2022

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	% Luasan Tingkat Potensi Sumber Daya Perkebunan			Total Luas (Ha)
		Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	
1	Banjar-Danau	99,99%	0,00%	0,01%	152,52
2	Banjar-Fluvio-Marin	20,22%	32,78%	47,00%	1.014,08
3	Banjar-Pegunungan Vulkanik	42,47%	24,23%	33,30%	9.648,63
4	Banjar-Perbukitan Vulkanik	61,50%	25,99%	12,51%	3.072,52
5	Buleleng-Fluvio-Marin	17,87%	43,54%	38,58%	1.119,15

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	% Luasan Tingkat Potensi Sumber Daya Perkebunan			Total Luas (Ha)
		Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	
6	Buleleng-Pegunungan Vulkanik	9,41%	19,26%	71,32%	826,69
7	Buleleng-Perbukitan Vulkanik	18,05%	26,72%	55,24%	2.680,89
8	Busungbiu-Pegunungan Vulkanik	24,89%	18,80%	56,30%	10.071,82
9	Busungbiu-Perbukitan Vulkanik	61,81%	10,40%	27,80%	3.999,83
10	Gerokgak-Danau	85,43%	0,00%	14,57%	30,19
11	Gerokgak-Fluvio-Marin	33,86%	23,17%	42,97%	5.658,11
12	Gerokgak-Koralian	39,19%	5,87%	54,94%	3.837,50
13	Gerokgak-Marin	52,55%	3,91%	43,54%	1.445,59
14	Gerokgak-Pegunungan Vulkanik	25,84%	5,57%	68,58%	27.699,33
15	Gerokgak-Perbukitan Karst	60,08%	9,15%	30,77%	1.883,81
16	Gerokgak-Perbukitan Vulkanik	32,99%	7,41%	59,60%	404,09
17	Kubutambahan-Fluvio-Marin	6,89%	5,79%	87,32%	159,61
18	Kubutambahan-Pegunungan Vulkanik	64,26%	2,84%	32,90%	4.977,44
19	Kubutambahan-Perbukitan Vulkanik	20,75%	6,85%	72,40%	6.719,94
20	Sawan-Fluvio-Marin	14,85%	4,03%	81,13%	397,42
21	Sawan-Pegunungan Vulkanik	33,69%	13,93%	52,38%	5.563,02
22	Sawan-Perbukitan Vulkanik	7,37%	11,53%	81,10%	3.168,88
23	Seririt-Fluvio-Marin	21,66%	23,98%	54,37%	1.470,47
24	Seririt-Pegunungan Vulkanik	34,21%	15,59%	50,20%	7.304,47
25	Seririt-Perbukitan Vulkanik	35,94%	24,64%	39,41%	3.478,23
26	Sukasada-Danau	99,11%	0,00%	0,89%	474,09
27	Sukasada-Fluvio-Marin	2,75%	0,47%	96,78%	50,59
28	Sukasada-Pegunungan Vulkanik	52,43%	14,87%	32,71%	14.425,20
29	Sukasada-Perbukitan Vulkanik	26,56%	17,19%	56,25%	1.128,27
30	Tejakula-Dataran Vulkanik	1,27%	23,33%	75,40%	327,58
31	Tejakula-Fluvio-Marin	5,75%	16,47%	77,78%	0,14
32	Tejakula-Pegunungan Vulkanik	30,00%	44,58%	25,42%	4.261,08
33	Tejakula-Perbukitan Vulkanik	31,43%	16,85%	51,73%	5.268,18
Total		35,28%	14,92%	49,80%	132.719,37

2.2.4.2 Potensi Sumber Daya Pertanian

Berdasarkan hasil analisis potensi sumber daya pertanian Kabupaten Buleleng dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yang terdiri dari kelas Sangat Rendah, Rendah dan Tinggi. Dilihat dari Gambar 2.6 dapat diketahui bahwasanya Kabupaten Buleleng dominasi potensi sumber daya pertaniannya berada pada kelas Tinggi yang terletak pada daerah Barat dan Timur.

Hal tersebut dapat terjadi karena daerah tersebut terbentuk dari daerah vulkan serta penggunaan lahannya berupa hutan di daerah barat dan sawah di daerah timur.

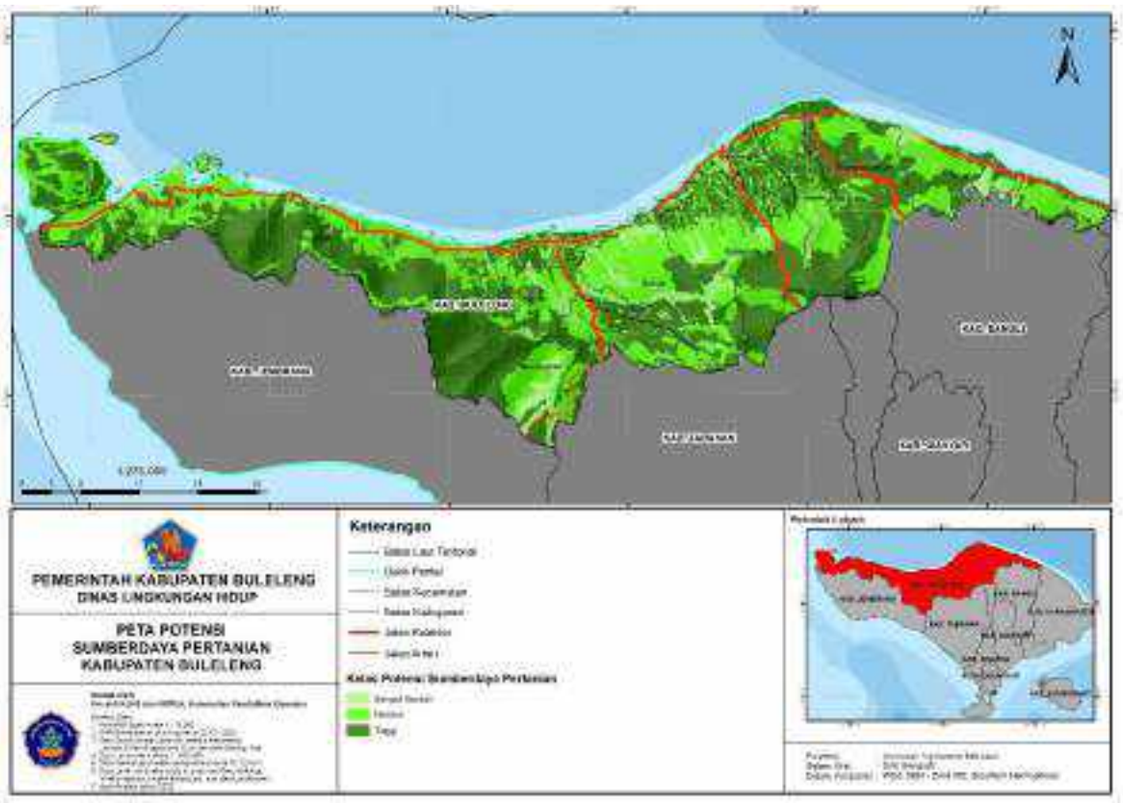

Gambar 2. 6 Peta Potensi Sumber Daya Pertanian Kabupaten Buleleng

Secara detail wilayah di Kabupaten Buleleng yang memiliki potensi sumber daya pertanian tertinggi terletak pada wilayah Kecamatan Sukasada sebesar 96,78% seluas 50,59 Ha. Kemudian juga terdapat pada wilayah Kecamatan Kubutambahan sebesar 87,32% seluas 159,61 dan Kecamatan Sawan sebesar 80,56% seluas 397,42. Data potensi sumber daya pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Potensi Sumber Daya Pertanian Kabupaten Buleleng Tahun 2022

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	% Luasan Tingkat Potensi Sumber Daya Pertanian			Total Luas (Ha)
		Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	
1	Banjar-Danau	99,98%	0,00%	0,02%	152,52
2	Banjar-Fluvio-Marin	20,79%	32,60%	46,61%	1.014,08
3	Banjar-Pegunungan Vulkanik	44,10%	22,95%	32,95%	9.648,63
4	Banjar-Perbukitan Vulkanik	33,18%	25,00%	41,82%	3.072,52
5	Buleleng-Fluvio-Marin	17,63%	43,79%	38,58%	1.119,15
6	Buleleng-Pegunungan Vulkanik	12,06%	19,26%	68,68%	826,69
7	Buleleng-Perbukitan Vulkanik	22,71%	26,57%	50,72%	2.680,89
8	Busungbiu-Pegunungan Vulkanik	43,05%	18,68%	38,26%	10.071,82
9	Busungbiu-Perbukitan Vulkanik	38,63%	5,34%	56,03%	3.999,83
10	Gerokgak-Danau	85,40%	0,02%	14,57%	30,19
11	Gerokgak-Fluvio-Marin	65,32%	23,78%	10,90%	5.658,11
12	Gerokgak-Koralian	41,41%	2,92%	55,67%	3.837,50
13	Gerokgak-Marin	61,89%	4,55%	33,56%	1.445,59
14	Gerokgak-Pegunungan Vulkanik	26,81%	3,70%	69,49%	27.699,33
15	Gerokgak-Perbukitan Karst	62,52%	0,00%	37,48%	1.883,81
16	Gerokgak-Perbukitan Vulkanik	39,71%	14,10%	46,19%	404,09
17	Kubutambahan-Fluvio-Marin	6,88%	5,81%	87,32%	159,61

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	% Luasan Tingkat Potensi Sumber Daya Pertanian			Total Luas (Ha)
		Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	
18	Kubutambahan-Pegunungan Vulkanik	39,03%	1,59%	59,38%	4.977,44
19	Kubutambahan-Perbukitan Vulkanik	29,34%	6,65%	64,00%	6.719,94
20	Sawan-Fluvio-Marin	15,41%	4,03%	80,56%	397,42
21	Sawan-Pegunungan Vulkanik	34,38%	10,55%	55,07%	5.563,02
22	Sawan-Perbukitan Vulkanik	35,16%	10,94%	53,89%	3.168,88
23	Seririt-Fluvio-Marin	25,83%	23,34%	50,82%	1.470,47
24	Seririt-Pegunungan Vulkanik	26,73%	8,83%	64,45%	7.304,47
25	Seririt-Perbukitan Vulkanik	29,32%	22,65%	48,03%	3.478,23
26	Sukasada-Danau	99,11%	0,00%	0,89%	474,09
27	Sukasada-Fluvio-Marin	2,75%	0,47%	96,78%	50,59
28	Sukasada-Pegunungan Vulkanik	37,77%	10,37%	51,86%	14.425,20
29	Sukasada-Perbukitan Vulkanik	26,56%	17,19%	56,25%	1.128,27
30	Tejakula-Dataran Vulkanik	1,27%	23,33%	75,40%	327,58
31	Tejakula-Fluvio-Marin	5,75%	16,47%	77,78%	0,14
32	Tejakula-Pegunungan Vulkanik	48,03%	27,01%	24,95%	4.261,08
33	Tejakula-Perbukitan Vulkanik	45,22%	16,85%	37,93%	5.268,18
Total		36,48%	12,39%	51,13%	132.719,37

2.3 Risiko Kebencanaan Wilayah

Secara umum, Kabupaten Buleleng didominasi oleh kondisi risiko bencana yang Tinggi hingga Sangat Tinggi. Jika dilihat secara lebih spesifik pada daerah Kecamatan Gerokgak memiliki kondisi risiko bencana Rendah.

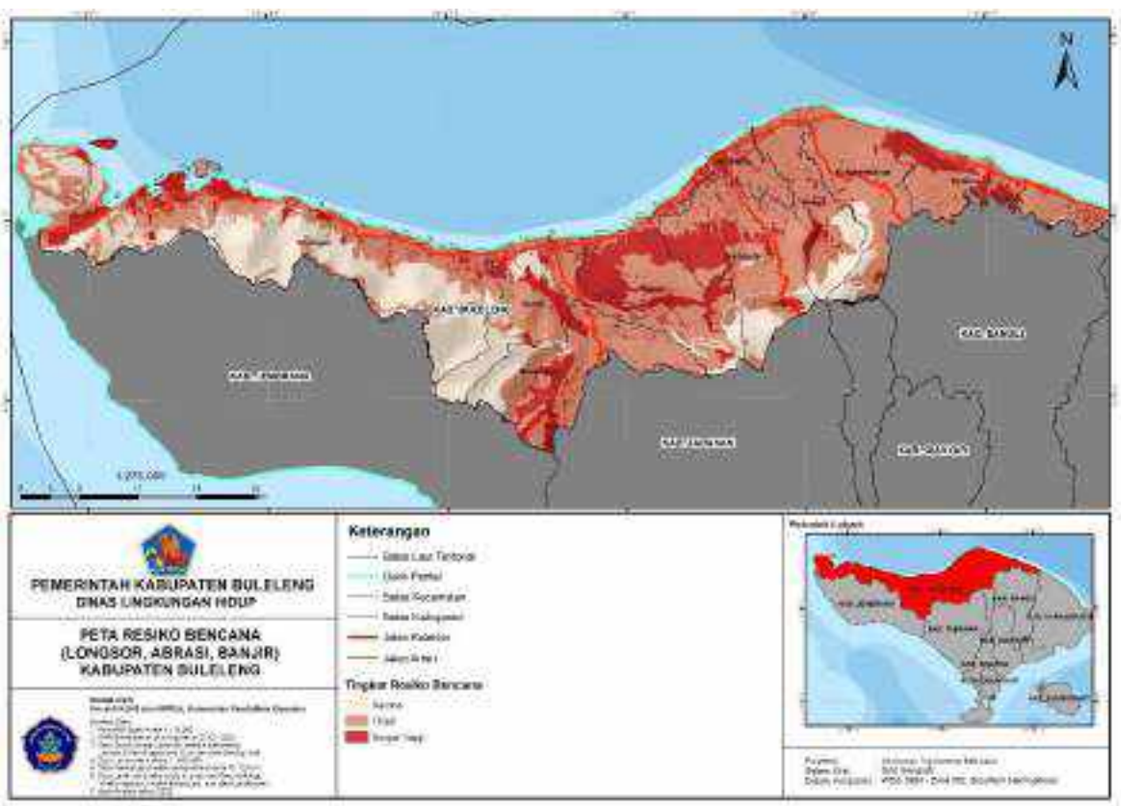

Gambar 2. 7 Risiko Kebencanaan Wilayah

Tabel 2. 7 Luasan Tingkat Resiko Bencana

No.	WPPLH (Wilayah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	% Luasan Tingkat Resiko Bencana				Total Luas (Ha)
		Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi	
1	Banjar-Danau	0,02%	0,00%	0,00%	99,97%	152,52
2	Banjar-Fluvio-Marin	0,00%	0,00%	51,06%	48,94%	1.014,08
3	Banjar-Pegunungan Vulkanik	12,11%	0,00%	38,68%	49,21%	9.648,63
4	Banjar-Perbukitan Vulkanik	4,51%	0,00%	49,71%	45,77%	3.072,52
5	Buleleng-Fluvio-Marin	0,00%	0,00%	60,05%	39,95%	1.119,15
6	Buleleng-Pegunungan Vulkanik	0,00%	0,00%	20,51%	79,49%	826,69
7	Buleleng-Perbukitan Vulkanik	0,01%	0,00%	31,05%	68,94%	2.680,89
8	Busungbiu-Pegunungan Vulkanik	21,17%	0,00%	25,44%	53,39%	10.071,82
9	Busungbiu-Perbukitan Vulkanik	0,03%	0,00%	5,45%	94,52%	3.999,83
10	Gerokgak-Danau	7,88%	0,00%	2,93%	89,19%	30,19
11	Gerokgak-Fluvio-Marin	0,01%	0,00%	47,33%	52,66%	5.658,11
12	Gerokgak-Koralian	49,78%	0,00%	5,98%	44,24%	3.837,50
13	Gerokgak-Marin	1,56%	0,00%	52,30%	46,15%	1.445,59
14	Gerokgak-Pegunungan Vulkanik	63,48%	0,00%	6,47%	30,05%	27.699,33
15	Gerokgak-Perbukitan Karst	35,33%	0,00%	9,15%	55,52%	1.883,81
16	Gerokgak-Perbukitan Vulkanik	0,00%	0,00%	38,68%	61,32%	404,09
17	Kubutambahan-Fluvio-Marin	0,00%	0,00%	8,32%	91,68%	159,61
18	Kubutambahan-Pegunungan Vulkanik	28,70%	0,00%	3,82%	67,48%	4.977,44
19	Kubutambahan-Perbukitan Vulkanik	0,07%	0,00%	10,69%	89,23%	6.719,94
20	Sawan-Fluvio-Marin	0,00%	0,00%	15,01%	84,99%	397,42
21	Sawan-Pegunungan Vulkanik	35,76%	0,00%	15,42%	48,82%	5.563,02
22	Sawan-Perbukitan Vulkanik	0,00%	0,00%	13,47%	86,53%	3.168,88
23	Seririt-Fluvio-Marin	4,45%	0,00%	40,75%	54,79%	1.470,47
24	Seririt-Pegunungan Vulkanik	40,80%	0,00%	12,09%	47,11%	7.304,47
25	Seririt-Perbukitan Vulkanik	13,34%	0,00%	38,81%	47,85%	3.478,23
26	Sukasada-Danau	0,57%	0,00%	2,99%	96,44%	474,09
27	Sukasada-Fluvio-Marin	0,00%	0,00%	0,47%	99,53%	50,59
28	Sukasada-Pegunungan Vulkanik	15,30%	0,00%	26,63%	58,07%	14.425,20
29	Sukasada-Perbukitan Vulkanik	0,00%	0,00%	20,09%	79,91%	1.128,27
30	Tejakula-Dataran Vulkanik	0,00%	0,00%	23,33%	76,67%	327,58
31	Tejakula-Fluvio-Marin	0,00%	0,00%	16,47%	83,53%	0,14
32	Tejakula-Pegunungan Vulkanik	1,20%	0,00%	27,81%	70,99%	4.261,08
33	Tejakula-Perbukitan Vulkanik	0,00%	0,00%	35,25%	64,75%	5.268,18
Total		24,73%	0,00%	21,34%	53,94%	132.719,37

BAB III
PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Analisis Isu Strategis dan Prioritas

Isu stretagis prioritas dirumuskan melalui dua mekanisme melalui telaahan permasalahan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan *Driver*, *Pressure*, *State*, *Impact* dan *Response*, serta hasil identifikasi isu yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait. Hasil dari dua mekanisme ini kemudian digabungkan dan kemudian disepakati melalui *Focus Group Discussion* (FGD) RPPLH. Ada 6 isu strategis priroitas yang disepakati yaitu 1) Alih Fungsi Lahan; 2) Pengelolaan sampah, limbah, pencemaran lingkungan; 3) Bencana Alam dan Kerusakan Lingkungan; 4) Konflik Akibat Sumber Daya Alam; 5) Permukiman Kumuh; 6) Pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas. Secara detail telaahan isu strategis prioritas ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Telaah Isu Strategis Prioritas

No.	Isu Strategis Paling Prioritas	Isu Prioritas Terkait	Faktor	Dampak
1	Alih Fungsi Lahan	• Alih fungsi lahan di sekitar mata air • Tingginya mobilitas penduduk • Tingginya pertumbuhan penduduk • Pelanggaran tata ruang • Penataan pengelolaan kawasan wisata • Banjir genangan/limpasan • Kurang optimalnya penanganan rumah tidak layak huni	• Peningkatan jumlah penduduk dan ragam usaha/kegiatan serta pesatnya pertumbuhan pembangunan maka dikhawatirkan akan terjadinya alih fungsi lahan-lahan terbuka hijau dan lahan pertanian. Beralihnya lahan-ahan pertanian yang ada menjadi kegiatan budidaya permukiman, perdagangan, dan jasa penunjang pariwisata tidak dapat terhindarkan. • Tingginya mobilitas penduduk akibat perkembangan sektor pendidikan di wilayah kajian cukup berpengaruh terhadap pergeseran penggunaan lahan sawah	• Meningkatkan resiko bencana • Meningkatkan sedimentasi dan erosi lahan, terutama pada danau dan DAS
2	Pengelolaan sampah, limbah, pencemaran lingkungan	• Tingginya pertumbuhan penduduk • Timbulan sampah dan limbah • Pencemaran udara, air dan tanah • Banjir genangan atau limpasan • Pengelolaan persampahan • Berkembangnya pembangunan infrastruktur	• Rendahnya kesadaran masyarakat terkait kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dan limbah, memicu rendahnya kesadaran dalam pemilahan sampah atau bahkan membuang sampah pada saluran drainase atau sungai • Peningkatan jumlah penduduk dan ragam kegiatannya yang sedikit banyak akan memunculkan residu (sampah atau limbah) dari hasil kegiatan tersebut • Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan usaha berbasis masyarakat serta perkembangan sektor pendidikan akan memunculkan sampah (minimal skala rumah tangga)	• Pencemaran air dan tanah • Banjir limpasan • Penurunan kualitas kesehatan masyarakat

No.	Isu Strategis Paling Prioritas	Isu Prioritas Terkait	Faktor	Dampak
3	Bencana Alam dan Kerusakan Lingkungan	• Pencemaran udara, air, dan tanah • Berkembangnya pembangunan infrastruktur Pertumbuhan penduduk • Timbulan limbah dan sampah • Pembangunan bandar udara, rel kereta api, dan jalan tol • Lahan kritis • Penurunan fungsi danau dan daerah aliran sungai (DAS) • Kerusakan ekosistem hutan • Bencana geologis, hidrologis, dan klimatologis	• Tingginya pertumbuhan kegiatan perkotaan, baik domestik, atau pendidikan akan memicu peningkatan limbah dan sampah, serta kemacetan lalu lintas di sekitarnya. • Zona permukiman, perdagangan dan jasa membutuhkan sarana pengelolaan air limbah, baik terpusat maupun individual. Zona ini juga membutuhkan jaringan distribusi air dan drainase yang baik.	• Pencemaran air tanah dan permukaan • Polusi udara • Defisit air • Banjir genangan • Meningkatnya erositifitas lahan • Abrasi
4	Konflik Akibat Sumber Daya Alam	• Lahan kritis • Penurunan fungsi danau dan daerah aliran sungai (DAS) • Kerusakan ekosistem hutan • Bencana geologis, hidrologis, dan klimatologis • Konflik pemanfaatan air	• Kondisi kekritisan lahan di wilayah hulu dapat menurunkan sumber daya air, baik limpasan maupun mata air. Penurunan sumber daya air sangat berpotensi memunculkan konflik pemanfaatan sumber daya alam (SDA) • Kebutuhan manusia akan ruang semakin tinggi, sehingga dapat memicu perubahan jenis tanaman pada hutan lindung menjadi tanaman produksi	• Konflik antar masyarakat dalam suatu wilayah administratif • Konflik antar wilayah
5	Permukiman Kumuh	• Kurang optimalnya penanganan rumah tidak layak huni • Bencana geologis, hidrologis, dan klimatologis	• Tingginya mobilitas penduduk pada wilayah kekotaan meningkatkan kebutuhan lahan untuk bermukim. Namun harga lahan yang ada sangat jauh melampaui pendapatan per kapita masyarakat • Kurang optimalnya penanganan rumah tidak layak huni akan menyebabkan munculnya masalah pada saluran drainase, dan kualitas udara di sekitarnya	• Banjir genangan dan limpasan • Penurunan kualitas udara dan air
6	Pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas	• Pembangunan bandar udara • Pembangunan fasilitas kereta api • Pengembangan infrastruktur jalan • Pembangunan jalan tol Soka – Celukan Bawang. • Bencana geologis, hidrologis, dan klimatologis	• Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara, kereta api, jalan, dan jalan bebas hambatan akan memicu alih fungsi lahan di sekitar pengembangan • Kegiatan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan aktivitas manusia diatasnya.	• Alih Fungsi lahan • Kemacetan lalu lintas • Polusi Udara

3.2 Target Lingkungan Hidup

Guna mencapai kondisi lingkungan hidup yang ideal diperlukan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang tidak hanya mengatur kondisi lingkungan hidup namun juga pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Kondisi lingkungan hidup yang akan dicapai melalui penerapan dokumen RPPLH Kabupaten Buleleng sebagai berikut.

A. Alih Fungsi Lahan Pertanian Produktif

1. Melakukan identifikasi lahan sawah dalam rangka perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2. Upaya perlindungan tata guna lahan yang mengatur tentang arahan pemanfaatan ruang sehingga dapat mengurangi alih fungsi lahan, khususnya lahan pertanian produktif. Hal tersebut sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
3. Upaya pengelolaan dan pemanfaatan lahan kering sebagai peluang pengembangan pertanian tanaman pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan lahan kering terutama pada Kecamatan Tejakula. Hal tersebut tentu memperhatikan karakteristik lahan kering dan biokimia tanah.

B. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Target Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai upaya penambahan/peningkatan luasan RTH yang didukung dengan pembuatan program kerja serta anggaran untuk jangka pendek, sedangkan realisasi pembuatan RTH di beberapa lokasi:

1. Pada tahun 2017 sudah direalisasi pembuatan RTH Taman Bung Karno di Jl. Jelantik Gingsir No. 2 Sukasada seluas 22.016 Ha dan Taman Yuwana Asri (Taman Klimpit) di Jl. Sudirman 79 Singaraja seluas 2,472 Ha (IKPLHD Kab. Buleleng, 2017).
2. Berdasarkan data Penyusunan Kajian RTH Kawasan Perkotaan Singaraja (2019), rencana pembangunan RTH untuk RTH Publik dan RTH Fungsi tertentu masing-masing 38.597,94 m2 dan 1.964.784,75 m2.
3. Target RTH Publik yaitu 583,69 Ha atau 70,09% dan target RTH Privat yaitu 306,19 Ha atau 73,53%, yang akan direncanakan pada program lanjutan Pemerintah Daerah Kab. Buleleng.

C. Sumber Daya Air

1. Berkurangnya Daerah Resapan

   Sebagai upaya perlindungan terhadap daerah resapan dan upaya untuk meningkatkan daerah resapan yaitu:

   a. Pembuatan embung, sumur resapan air dan lubang biopori.
   b. Penanaman dengan menentukan vegetasi yang tepat untuk ditanam di daerah resapan air.
   c. Penegakan Peraturan Daerah mengenai penertiban penebangan pohon dan bambu di luar kawasan hutan.
   d. Penerapan inovasi terhadap perumahan dengan mewajibkan memiliki bozem dan penanaman vegetasi teduh.

2. Indeks Kualitas Air pada Kategori Kurang

   Adapun upaya untuk mencegah penurunan kualitas air yang terjadi yaitu:

   a. Pencegahan pencemaran sungai.
   b. Penanganan pencemaran air.
   c. Pemantauan kualitas air.
   d. Upaya mempertahankan daya tampung danau dan kualitas air danau.

e. Upaya meningkatkan kualitas air sumur.
f. Upaya penanggulangan kemiskinan.

3. Eksploitasi Air Tanah
   1. Upaya pengendalian pemanfaatan air tanah.

D. Persampahan

1. Aspek Teknis
   a. Peremajaan sarana persampahan yang ada di Kabupaten Buleleng.
   b. Penambahan sarana persampahan yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah yang ada.
   c. Penambahan lahan TPA.

2. Aspek Peraturan
   a. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 dan perubahannya serta Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
   b. *Monitoring* pengolahan sampah mandiri di masyarakat.

3. Aspek Kelembagaan
   a. Peningkatan kelembagaan dengan pelatihan dan disesuaikan dengan kebijakan.
   b. Peningkatan *capacity building* dengan berbagai pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM).
   c. Pembimbingan KSM dan unit pengelolaan sampah lainnya (Bank Sampah) yang dikelola oleh masyarakat.

4. Aspek Keuangan
   a. Pengembangan mekanisme pembiayaan dengan swasta.
   b. *Review* penyesuaian tarif retribusi.
   c. Inventarisasi sumber retribusi sampah domestik dan non-domestik.
   d. Melakukan kajian untuk meningkatkan sistem pemungutan retribusi.

5. Aspek Peran Serta Masyarakat
   a. Melakukan kampanye *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* (3R).
   b. Pemicuan dan sosialisasi mengenai “Lingkungan Bersih dari Sampah”.
   c. Mengadakan lomba kebersihan.

BAB IV
ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Buleleng selama 30 tahun kedepan, diskenariokan sebagai penjabaran dari tindakan menyeluruh terkoodinasi oleh seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sebagai respon terhadap kondisi lingkungan hidup yang diperkirakan akan dihadapi akibat proses pembangunan. Dalam beberapa tahun ke depan, penggunaan sumber daya alam sebagai modal pembangunan masih akan terjadi. Percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan baru dan ekspolitasi energi yang bersumber dari fosil, yang kemudian diikuti dengan meluasnya perkotaan, meningkatnya kepadatan penduduk, dan menurunnya kualitas air dan udara, tetap menjadi sumber pendorong utama penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Buleleng.

Skema skenario kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Buleleng mencakup strategi untuk menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, memperbaiki kualitas lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim, sekaligus mendorong efisiensi konsumsi dan pemanfaatan sumber daya alam. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng secara umum memuat pengaturan sebagai berikut:

1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang layak dimanfaatkan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan:

a. Penerapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).
b. Penerapan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
c. Membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan terhadap wilayah, dengan cara:

a. Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi.
b. Menetapkan deliniasi wilayah yang memiliki fungsi lindung dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Mempertahankan luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan sumber daya genetik dan habitat spesies tinggi.
d. Melindungi dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan jasa lingkungan regulator dan penyimpanan air tinggi.
e. Mempertahankan kondisi dan fungsi daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi.

3. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam diarahkan dalam rangka efektifitas pencapaian target yang telah ditetapkan.

a. Rencana Pengendalian, antara lain:
   - Penguatan tata kelola sumber daya alam (SDA) sesuai dengan kewenangannya.
   - Pencegahan dampak lingkungan hidup.
   - Penerapan sistem perizinan lingkungan.
   - Pengelolaan sampah dan limbah.

b. Rencana Pemantauan, antara lain:
   - Menetapkan baku mutu lingkungan.
   - Pemantauan baku mutu lingkungan.
   - Menetapkan kelas air pada sungai-sungai prioritas daerah.
   - Pengembangan infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan hidup.

c. Rencana Pendayagunaan dan Pelestarian, antara lain:
   - Pemulihan daerah tercemar dan rehabilitasi lahan kritis.
   - Penguatan kebijakan *Reduce*, *Reuse*, *Recycle* (3R).
   - Penelitian dan pengembangan pemanfaatan nilai keanekaragaman hayati.

4. Rencana Upaya Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana adaptasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka penyesuaian dan mengantisipasi risiko serta meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim, antara lain:

a. Meningkatkan adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada.
b. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air.
c. Pengurangan eksploitasi air tanah.
d. Revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana mitigasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka mencegah, menahan dan/atau memperlambat efek gas rumah kaca dengan cara mengurangi sumber-sumber penghasil gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon, antara lain:

a. Pemantauan emisi gas rumah kaca.
b. Penerapan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan.
c. Pengembangan energi alternatif sesuai dengan kemampuan daerah
d. Mengendalikan tata ruang kawasan perkotaan secara komprehensif.

Dari hasil identifikasi isu permasalahan lingkungan hidup serta target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama kurun waktu 30 tahun hingga tahun 2052 di Kabupaten Buleleng, maka secara rinci arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

4.1 Rencana Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam

Kebijakan: Pemanfaatan secara Berkelanjutan Sumber Pertanian dan Perkebunan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Membatasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Non-Pertanian	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Penyepakatan pengembangan lahan pertanian abadi	1. Kecamatan Sukasada dengan bentuk lahan Fluvio-Marin; 2. Kecamatan Kubutambahan dengan bentuk lahan Pegunungan Vulkanik; 3. Kecamatan Sawan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin.	1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda; 4. Balitbang Inovda; 5. DKPP.										
			Membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dan membatasi pengembangan non-pangan pada wilayah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi		1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda; 4. Balitbang; 5. DKPP.										
			Intensifikasi lahan pertanian		1. Dinas Pertanian; 2. Bappeda; 3. Balitbang Inovda; 4. DKPP.										
		Tersedianya Informasi Tingkat Kerawanan Pangan dan Kerentanan Desa	Reorientasi perluasan areal pertanian baru dan optimasi lahan		1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda;										

Kebijakan: Pemanfaatan secara Berkelanjutan Sumber Pertanian dan Perkebunan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
		terhadap Dampak Perubahan Iklim			4. Balitbang Inovda; 5. DKPP.										
		Tersedianya Peta dan Informasi Tentang Lahan Terlantar yang Berpotensi Bagi Perluasan Areal dan Sumber Pertumbuhan Produksi Baru	Identifikasi dan pemetaan lahan terlantar dan lahan potensial dan berisiko kecil untuk perluasan areal pertanian	Kecamatan Tejakula dengan bentuk lahan Pegunungan Vulkanik	1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda; 4. Balitbang Inovda; 5. DKPP.										
2	Perlindungan Penggunaan Lahan Pertanian Produktif Untuk Perumahan dan Kawasan Terbangun Lainnya	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Pemetaan lahan pertanian produktif	1. Kecamatan Sukasada dengan bentuk lahan Fluvio-Marin 2. Kecamatan Kubutambahan dengan bentuk lahan Pegunungan Vulkanik 3. Kecamatan Sawan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda; 4. Balitbang Inovda; 5. DKPP.										
		Melindungi Kawasan Wilayah Lumbung Pangan	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur strategis yang melewati lahan-lahan pertanian produktif		1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda; 4. Balitbang Inovda; 5. DKPP.										

Kebijakan: Pemanfaatan secara Berkelanjutan Sumber Pertanian dan Perkebunan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
3	Optimalisasi Pengelolaan Lahan Kering Untuk Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan	Pemanfaatan Lahan Kering Guna Pengembangan Pertanian	Pelaksanaan tinjauan tentang sifat/karakteristik lahan kering eksisting	1. Kecamatan Tejakula dengan bentuk lahan Pegunungan Vulkanik	1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda; 4. Balitbang Inovda; 5. DKPP.										
		Pemanfaatan Lahan Kering Guna Pengembangan Pertanian	Pemantauan lahan kering eksisting dan perencanaan peluang pengembangan lahan kering terhadap tanaman pangan		1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda; 4. Balitbang Inovda; 5. DKPP.										
			Pembinaan terhadap SDM terkait program optimalisasi pengelolaan lahan	1. Kecamatan Sukasada dengan bentuk lahan Fluvio-Marin 2. Kecamatan Kubutambahan dengan bentuk lahan Pegunungan Vulkanik 3. Kecamatan Sawan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda; 4. Balitbang Inovda; 5. DKPP.										
4	Peningkatan Ketahanan Sumber Daya Pertanian Terhadap Ancaman Perubahan Iklim	Terlaksananya Identifikasi Terhadap Guna Lahan Sawah	Pengembangan *disaster risk management* untuk bencana dampak perubahan iklim pada kawasan pertanian												

Kebijakan: Pemanfaatan secara Berkelanjutan Sumber Pertanian dan Perkebunan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
		Tersedianya Model Usaha Tani Integrasi Ternak dan Tanaman yang Tahan Cekaman Iklim	Pengembangan sistem integrasi tanaman-ternak untuk mengurangi risiko iklim dan optimalisasi penggunaan sumber daya lahan dan budidaya pertanian		1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda; 4. Balitbang Inovda; 5. DKPP.										
		Tersedianya Informasi Tingkat Kerawanan Pangan dan Kerentanan Desa terhadap Dampak Perubahan Iklim	Pengembangan sistem penyediaan, penanganan, dan penyimpanan air bersih pada kegiatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian		1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda; 4. Balitbang Inovda; 5. DKPP.										
		Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan dan perbaikan infrastruktur penampung dan pengendali air skala besar di daerah rawan kelangkaan air	1. Kecamatan Tejakula dengan bentuk lahan pegunungan vulkanik	1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. Bappeda; 4. Balitbang Inovda; 5. DKPP.										
5	Peningkatan Kualitas Komoditas Perkebunan	Meningkatnya Kualitas Produktivitas Komoditas	Pemetaan lokasi dan luasan kawasan peruntukan perkebunan	1. Kecamatan Sukasada dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	1. Dinas PUTR; 2. Disperkimta; 3. Dinas Pertanian; 4. DKPP.										

Kebijakan: Pemanfaatan secara Berkelanjutan Sumber Pertanian dan Perkebunan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
	Sekaligus Mengurangi Konflik Pemanfaatan Lahan Perkebunan dan Kehutanan	Perkebunan, Mengurangi Konflik Penggunaan Lahan, Peningkatan Kepedulian Masyarakat Sekitar Hutan	Pemetaan kondisi perkebunan produktif dan unggulan	2. Kecamatan Kubutambahan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin 3. Kecamatan Sawan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	1. Dinas PUTR; 2. Disperkimta; 3. Dinas Pertanian; 4. DKPP.										
			Pengembangan kawasan agribisnis dan terminal agribisnis		1. Dinas PUTR; 2. Disperkimta; 3. Dinas Pertanian; 4. DKPP.										
			Pengembangan agroekowisata perkebunan		1. Dinas PUTR; 2. Disperkimta; 3. Dinas Pertanian; 4. DKPP.										
			Konservasi dan revegetasi pada kawasan perkebunan		1. Dinas PUTR; 2. Disperkimta; 3. Dinas Pertanian; 4. DKPP.										
			Pelarangan penggunaan pestisida dan herbisida serta pengembangan perkembunan organik		1. Dinas PUTR; 2. Disperkimta; 3. Dinas Pertanian; 4. DKPP.										

Kebijakan: Pemanfaatan secara berkelanjutan Sumber Daya Pesisir dan Perairan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan Pesisir	Terjaganya Ekosistem Pesisir	Rehabilitasi kawasan mangrove	1. Kecamatan Gerokgak dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	1. DLH; 2. DKPP.										
			Pembatasan reklamasi lahan	1. Kecamatan Seririt dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	1. DLH; 2. DKPP.										
2	Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Derah Pesisir dari Abrasi dan Intrusi Air Laut	Tanggap Terhadap Bencana Akibat Perubahan Iklim	Pembuatan tanggul penahan gelombang di daerah pesisir padat penduduk	1. Kecamatan sawan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin 2. Kecamatan Buleleng dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	Disperkimta										
			Pembatasan penggunaan lahan pesisir untuk kawasan komersial, pemukiman, perkantoran atau kawasan terbangun lainnya	1. Kecamatan sawan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin 2. Kecamatan Buleleng dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	1. Dinas PUTR; 2. Disperkimta; 3. DLH.										
			Menerapkan konsep wisata ramah lingkungan dalam	1. Kecamatan Sawan dengan	1. Dinas Pariwisata; 2. DLH.										

Kebijakan: Pemanfaatan secara berkelanjutan Sumber Daya Pesisir dan Perairan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
			pembangunan infrastruktur wisata di kawasan pesisir	bentuk lahan Fluvio-Marin 2. Kecamatan Buleleng dengan bentuk lahan Fluvio-Marin											
3	Identifikasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Ekosistem Sumber Daya Air di Pesisir dan Laut	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan	Peningkatan operasional pengawasan sumber daya kelautan (pemetaan kawasan perairan dengan ekosistem rusak, serta terdampak pencemaran)	1. Kecamatan Gerokgak dengan bentuk lahan Perbukitan Karst	1. Bappeda; 2. Balitbang Inovda; 3. BPBD; 4. DLH; 5. DKPP.										
			Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya		1. Bappeda; 2. Balitbang Inovda; 3. BPBD; 4. DLH; 5. DKPP.										
4	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Daerah Pelindung Non-Struktural atau Alamiah	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pelindung Pantai Non-struktural	Rehabilitasi daerah pelindung non-struktural/alamiah pantai dan kawasan di belakangnya		DLH										

Kebijakan: Pemanfaatan secara berkelanjutan Sumber Daya Pesisir dan Perairan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
	Pantai dan Kawasan Dibelakangnya Berdasarkan Hasil Kajian dan Identifikasi Ekosistem Pesisir dan Laut	seperti Vegetasi Pantai, Terumbu Karang													

Kebijakan: Pembatasan Pemanfaatan Sumber Daya Kehutanan dan Perairan						Waktu Pelaksanaan 5 tahun ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Menurunkan Risiko Kebakaran Hutan	Pengukuhan dan penetapan tata batas hutan	1. Kecamatan Sawan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin 2. Kecamatan Gerokgak dengan bentuk	1. Bappeda; 2. Balitbang Inovda; 3. Dinas PUTR; 4. DLH; 5. KPH Bali Utara.										
			Operasi pengamanan hutan		1. Bappeda; 2. Balitbang Inovda;										

Kebijakan: Pembatasan Pemanfaatan Sumber Daya Kehutanan dan Perairan						Waktu Pelaksanaan 5 tahun ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
				lahan Fluvio-Marin 3. Kecamatan Buleleng dengan Bentuk lahan Fluvio-Marin	3. Dinas PUTR; 4. DLH; 5. KPH Bali Utara.										
			Peningkatan kapasitas Brigade Pengendali Kerusakan Hutan		1. Bappeda; 2. Balitbang Inovda; 3. Dinas PUTR; 4. DLH; 5. KPH Bali Utara.										
			Penegasan zonasi pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar hutan dan ekosistem alami di kawasan resapan air		1. Bappeda; 2. Balitbang Inovda; 3. Dinas PUTR; 4. DLH; 5. KPH Bali Utara.										
2	Pemulihan Kawasan Konservasi pada Kawasan Jasa Lingkungan	Terselenggaranya Konservasi Kawasan Danau, Kawasan Hutan/ Kawasan Resapan Air (Kawasan	Penegasan zonasi pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar hutan dan ekosistem	1. Kecamatan Sawan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	1. Dinas PUTR; 2. Bappeda; 3. Balitbang Inovda; 4. DLH;										

Kebijakan: Pembatasan Pemanfaatan Sumber Daya Kehutanan dan Perairan						Waktu Pelaksanaan 5 tahun ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
	Regulator Tinggi dan Penyimpan Air Tinggi	Lindung, Taman Nasional, dsb.)	alami di kawasan resapan air	2. Kecamatan Gerokgak dengan bentuk lahan Fluvio-Marin 3. Kecamatan Buleleng dengan Bentuk lahan Fluvio-Marin	5. KPH Bali Utara.										
			Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan		1. Bappeda; 2. Balitbang Inovda; 3. Dinas PUTR; 4. DLH; 5. KPH Bali Utara.										

Kebijakan: Pencadangan Sumber Daya Pangan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Perlindungan Lumbung Pangan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Membatasi pengembangan non-pangan pada wilayah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi	1. Kecamatan Sawan pada bentuk lahan Perbukitan Vulkanik 2. Kecamatan Busungbiu pada bentuk lahan Perbukitan Vulkanik	1. Bappeda; 2. DLH; 3. Dinas Pertanian; 4. DKPP.										
2	Pengembangan Lahan kering Terhadap Tanaman Pangan	Melindungi Kawasan Wilayah Lumbung Pangan	Pembatasan pengembangan perumahan dan infrastruktur terutama pada wilayah-wilayah lumbung pangan												
3	Pemantauan Lahan Kering Eksisting dan Perencanaan Peluang Pengembangan Lahan Kering Terhadap Tanaman Pangan	Tersedianya Informasi Tingkat Kerawanan Pangan dan Kerentanan Desa Terhadap Dampak Perubahan Iklim	Program penerapan optimalisasi pengelolaan lahan kering untuk pengembangan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Gerokgak pada bentuk lahan Koralian											
4	Rencana Peningkatan Diversifikasi dan		Pemantauan lahan kering eksisting dan perencanaan peluang pengembangan lahan kering terhadap		1. Dinas Pertanian; 2. DLH; 3. DKPP.										

Kebijakan: Pencadangan Sumber Daya Pangan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
	Ketahanan Pangan Masyarakat		tanaman pangan												
5	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dan Kemandirian Pangan		Identifikasi perkembangan tingkat kerawanan pangan sebagai dampak perubahan iklim terhadap kemampuan/penurunan produksi pangan		1. Bappeda; 2. DLH; 3. Dinas Pertanian; 4. DKPP.										
6			Analisis dampak perubahan iklim terhadap aksesibilitas pangan		1. DLH; 2. Dinas Pertanian; 3. DKPP.										

Kebijakan: Pencadangan Sumber Daya Air						Waktu Pelaksanaan 5 tahun ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan	Pengelolaan sumber daya air	1. Kecamatan Banjarpada bentuk lahan Danau	Dinas PUTR										

Kebijakan: Pencadangan Sumber Daya Air						Waktu Pelaksanaan 5 tahun ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
2	Perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) Tanah	Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir	Perlindungan daerah tangkapan air (air tanah, pemanenan air hujan, disalinasi)	2. Kecamatan Gerokgak pada bentuk lahan Danau 3. Kecamatan Sukasada pada bentuk lahan Danau	1. DLH; 2. Dinas PUTR; 3. Perumda Tirta Hita Buleleng.										
3	Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup Sektor Sumber Daya Air		Konservasi daerah tangkapan air		1. DLH; 2. Dinas PUTR.										
4	Peningkatan Manajemen dan Pengembangan Prasarana Sumber Daya Air Untuk Pengendalian Daya Rusak Air				1. DLH; 2. Dinas PUTR; 3. Perumda Tirta Hita Buleleng.										

Kebijakan: Pencadangan Sumber Daya Non Hayati Lainnya						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2025	2026	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) Tanah	Terjaganya Cadangan Air	Konservasi daerah tangkapan air	Kecamatan Busungbiu-Pegunungan Vulkanik	1. Dinas PUTR; 2. DLH.										

4.2 Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Kebijakan: Penjagaan Sistem Hidrologi DAS dan Kepesisiran						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2025	2026	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Rancang Ulang dan Perbaikan Infrastruktur yang Berpengaruh Terhadap Berkurangnya Pengendalian Atas Kelancaran Aliran Air Permukaan	Terjaganya Sistem Hidrologi DAS	1. Pembangunan infrastruktur hijau 2. Gerakan budaya menanam pohon	Kecamatan Banjarpada betuk lahan Perbukitan Vulkanik	DLH										
			1. Penetapan fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan hidrologi air 2. Rehabilitasi dan konservasi DAS hulu untuk meningkatkan daya serap air untuk mengurangi ancaman kekeringan dan banjir 3. Pembangunan pos hidrologi telemetri.	Kecamatan Buleleng pada bentuk lahan Fluvio Marin	1. Bappeda; 2. Balitbang Inovda; 3. DLH.										
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan Pesisir.	Terjaganya Ekosistem Pesisir	Rehabilitasi kawasan mangrove	Kecamatan Gerokgak pada bentuk lahan Marin	DLH										

Kebijakan: Penjagaan Sistem Hidrologi DAS dan Kepesisiran						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2025	2026	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
			Pembatasan reklamasi lahan	Kecamatan Seririt pada bentuk lahan Fluvio Marin	1. DLH; 2. Dinas PUTR.										
			Pembuatan tanggul penahan gelombang di daerah pesisir padat penduduk	Kecamatan Banjar pada bentuk lahan Perbukitan Vulkanik	Disperkimta										

Kebijakan: Penetapan dan Pemeliharaan RTH dan Wilayah yang Dilindungi						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No.	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2025	2026	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1		Masyarakat Berperan Aktif dalam Penghijauan dan Pengelolaan RTH	Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan RTH		1. Dinas PUTR; 2. DLH.										
			Peningkatan jumlah RTH perkotaan dan revitalisasi lahan terbuka												

Kebijakan: Penetapan dan Pemeliharaan RTH dan Wilayah yang Dilindungi						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No.	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2025	2026	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
			hijau yang sebelumnya sudah ada												

Kebijakan: Pemeliharaan dan Perlindungan Fungsi dan Kualitas Lingkungan dari Aktifitas Pembangunan						Waktu Pelaksanaan 5 tahun ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Pengendalian Pencemaran Air	• Meningkatnya Indeks Kualitas Air Secara Bertahap • Menurunnya Timbulan Sampah dan Limbah di Badan Air atau Sekitar Aliran Sungai/Drainase	• Pengembangan instalasi pengelolaan air limbah terpadu; • Pengelolaan sampah berbasis sumber; • Pengembangan Kebijakan dan Program Kendaraan Listrik; • Pencanangan program atau kebijakan pengembangan pembangkit listrik skala rumahan	Semua unit WPPLH	1. DLH; 2. Balitbang Inovda; 3. Bappeda; 4. Dinas PUTR.										
2	Pengendalian Pencemaran Udara	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara													
3	Pengendalian Pencemaran Tanah	Menurunnya Timbulan Sampah dan Limbah di Wilayah Permukiman atau Padat Aktivitas Industri, Perdagangan, dan Jasa													

Kebijakan: Pemeliharaan dan Perlindungan Fungsi dan Kualitas Lingkungan dari Aktifitas Pembangunan						Waktu Pelaksanaan 5 tahun ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
4	Pengendalian Alih Fungsi Lahan	• Menurunnya Luasan Lahan Kritis; • Meningkatnya Indeks Kualitas Tutupan lahan.	berbasis energi terbarukan on grid system; • Penghijauan pada lahan kritis; • Program penanaman mangrove dan terumbu karang; • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan mangrove, terumbu, dan karst; • Penerapan agroforestry pada ekosistem karst; • Pengembangan pengelolaan limbah B3; • Penerapan persyaratan UKL – UPL dan AMDAL sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; • Penerapan ijin lingkungan pada usaha/kegiatan sesuai dengan											
5	Perlindungan dan Konservasi Ekosistem Mangrove, Terumbu, dan Karst	• Meningkatnya Luasan lahan Mangrove; • Meningkatnya Luasan Habitat Bentik Terumbu; • Mempertahankan Luasan Tutupan Vegetasi pada Ekosistem Karst;													

Kebijakan: Pemeliharaan dan Perlindungan Fungsi dan Kualitas Lingkungan dari Aktifitas Pembangunan						Waktu Pelaksanaan 5 tahun ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
			peraturan perundangan yang berlaku.												

4.3 Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA

Kebijakan: Pemantauan serta Pemeliharaan Kualitas dan Kondisi Perairan dan Pesisir						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan Pesisir	Terjaganya Ekosistem Pesisir	Rehabilitasi kawasan mangrove	Kecamatan Gerokgak dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	DLH										
			Pembatasan reklamasi lahan	Kecamatan Seririt dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	1. DLH; 2. Dinas PUTR;										
2	Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Daerah Pesisir dari Abrasi dan Intrusi Air Laut	Tanggap terhadap bencana akibat perubahan iklim	Penanaman terumbu karang dan mangrove pada ekosistem yang sesuai di kawasan rawan abrasi	Kecamatan Gerokgak dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	DLH										

Kebijakan: Pemantauan serta Pemeliharaan Kualitas dan Kondisi Perairan dan Pesisir						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
			Pembuatan tanggul penahan gelombang di daerah pesisir padat penduduk	1. Kecamatan Sawan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin 2. Kecamatan Buleleng dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	Disperkimta										
			Pembatasan penggunaan lahan pesisir untuk kawasan komersial, pemukiman, perkantoran atau kawasan terbangun lainnya	1. Kecamatan sawan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin 2. Kecamatan Buleleng dengan bentuk lahan Fluvio-Marin	1. Dinas PUTR; 2. Disperkimta; 3. DLH.										
			Menerapkan konsep wisata ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur wisata di kawasan pesisir	1. Kecamatan Sawan dengan bentuk lahan Fluvio-Marin 2. Kecamatan Buleleng dengan	1. Dinas Pariwisata; 2. DLH.										

Kebijakan: Pemantauan serta Pemeliharaan Kualitas dan Kondisi Perairan dan Pesisir						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
				bentuk lahan Fluvio-Marin											
3	Identifikasi, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Ekosistem Sumber Daya Air di Pesisir dan Laut	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan	Peningkatan operasional pengawasan sumber daya kelautan (pemetaan kawasan perairan dengan ekosistem rusak, serta terdampak pencemaran)	Kecamatan Gerokgak dengan bentuk lahan Perbukitan Karst	1. Bappeda; 2. Balitbang Inovda; 3. BPBD; 4. DLH; 5. DKPP.										
		Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada kawasan konservasi perairan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya		1. Bappeda; 2. Balitbang Inovda; 3. BPBD; 4. DLH; 5. DKPP.										
4	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Daerah Pelindung Non-struktural atau Alamiah Pantai dan Kawasan	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pelindung Pantai Non-struktural seperti Vegetasi	Rehabilitasi daerah pelindung non-struktural/alamiah pantai dan kawasan dibelakangnya		DLH										

Kebijakan: Pemantauan serta Pemeliharaan Kualitas dan Kondisi Perairan dan Pesisir						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2023	2024	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
	Dibelakangnya Berdasarkan Hasil Kajian dan Identifikasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Pantai, Terumbu Karang													

Kebijakan: Perlindungan dan Pelestarian Fungsi Jasa Ekosistem Tinggi						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2025	2026	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Daerah Pelindung Non-struktural atau Alamiah Pantai dan Kawasan Dibelakangnya	1. Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Pelindung Pantai Non-struktural seperti Vegetasi Pantai, Terumbu Karang 2. Terjaganya Ekosistem Pesisir	1. Penanaman terumbu karang dan mangrove pada ekosistem yang sesuai di kawasan rawan abrasi 2. Rehabilitasi kawasan mangrove 3. Pemeliharaan dan rehabilitasi ekosistem sumber daya	Kecamatan Gerokgak pada bentuk lahan Fluvio-Marin	DLH										

Kebijakan: Perlindungan dan Pelestarian Fungsi Jasa Ekosistem Tinggi						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2025	2026	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
			air di pesisir dan laut												
2	Perlindungan Ekosistem Wilayah		Pembuatan tanggul penahan gelombang di daerah pesisir padat penduduk Laut		Dinas PUTR										

4.4 Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim

Kebijakan: Rehabilitasi Hutan dan Lahan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2025	2026	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Rehabilitasi Kawasan Hutan Maupun Tutupan Vegetasi Sebagai Daerah Resapan Air	Tercapainya Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas	Rehabilitas lahan kritis dan lahan bekas kebakaran hutan pada kawasan hutan	Kecamatan Gerokgak pada bentuk lahan Perbukitan Vulkanik	DLH										
2	Perbaikan Kelola Hutan Serta		Penegasan zonasi pemanfaatan ruang												

Kebijakan: Rehabilitasi Hutan dan Lahan						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2025	2026	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
	Pemantapan Fungsi Hutan Sebagai Kawasan Perlindungan Ekosistem Wilayah		pada kawasan sekitar hutan dan ekosistem alami di kawasan resapan air.												

Kebijakan: Penetapan dan Penerapan Prioritas Mitigasi Bencana						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2025	2026	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
1	Pengendalian Bencana Longsor dan Kebakaran Hutan	Pencegahan Bencana dengan Menggunakan Mekanisme Penertiban dan Pengawasan	Peningkatan kapasitas Brigade Pengendali Kerusakan Hutan	Kecamatan Kubutambahan pada bentuk lahan Fluvio-Marin	DLH										
			1. Penyusunan peta rawan bencana kebakaran 2. Penertipan/ Pengawasan perijinan dan peraturan tentang pemukiman di	Kecamatan Gerokgak pada bentuk lahan Perbukitan Vulkanik	Bappeda										

Kebijakan: Penetapan dan Penerapan Prioritas Mitigasi Bencana						Waktu Pelaksanaan 5 Tahun Ke..									
						1					2	3	4	5	6
No	Strategi	Target LH	Indikasi Program	Prioritas Lokasi	Penanggung Jawab	2025	2026	2025	2026	2027	2028 - 2032	2033 - 2037	2038 - 2042	2043 - 2047	2048 - 2052
			daerah rawan longsor dan banjir												
2	Pengembangan Sistem Peringatan Dini Bencana Klimatologi dan Oseanografi	1. Tanggap Terhadap Bencana Akibat Perubahan Iklim 2. Terlaksananya Pengadaan Alat Sistem Peringatan Dini di Kawasan yang Rentan Terhadap Bencana Klimatologi dan Osenaografi	1. Pengembangan sistem peringatan dini 2. Pembangunan pos hidrologi telemetri 3. Penelitian perkiraan dan pengendalian kekeringan 4. Penyususunan baseline data informasi kawasan rawan bencana dan strategi pengendaliannya	Kecamatan Gerokgak pada bentuk lahan Pegunungan Vulkanik	DLH										

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sri Madya Banyuning Singaraja Telp./Fax. (0362) 3302024 Kode Pos 81141
Website : http:dlh.bulelengkab.go.id, Email : dlh@bulelengkab.go.id